

L A P O R A N
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Teuku Umar No. 7 Telepon (0356) 321785
T U B A N - 62317

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai pertanggung jawaban kinerja instansi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selama 1 (satu) tahun yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pendukung LPJ Bupati Tuban tahun 2019 di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tuban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 adalah meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan indikator tujuannya adalah IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan penetapan indikator kinerja bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mana pada tahun 2019 capaiannya yaitu Indikator persentase kepemilikan KTP elektronik capaiannya 92,12 %, persentase kepemilikan kartu keluarga capaiannya 100 %, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak capaiannya 13,63 %, persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun capaiannya 92,66 %, persentase kepemilikan akta kematian capaiannya 79,72 % dan untuk indikator IKM pelayanan administrasi kependudukan capaiannya Baik.

Adapun untuk sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan telah ditetapkan indikator kinerja persentase ketersediaan informasi data kependudukan dengan capaian 100 %. Dengan demikian, secara umum masing-masing indikator telah mencapai target yang diharapkan.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
B. REALISASI ANGGARAN	28
BAB. IV PENUTUP	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

Didalam pelaksanaan pembangunan tentunya melibatkan beberapa aspek. Salah satunya terkait dengan penduduk. Penduduk merupakan pelaksana atau subyek dari pembangunan itu sendiri, yang harus dibina dan dikerahkan secara efektif, sehingga benar-benar menjadi potensi yang besar dan bermanfaat bagi proses kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Salah satu pembangunan dibidang kependudukan tentunya berkaitan erat dengan kepemilikan dokumen kependudukan. Dengan demikian kepemilikan dokumen kependudukan menjadi sesuatu yang urgen dan tentunya harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang kependudukan, Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima dan terbaik serta memotivasi masyarakat untuk melengkapi diri dengan identitas kependudukannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 52 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - e. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
 - f. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tupoksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 Bidang, 1 Sekretariat, yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5. Sekretariat

Masing – masing Bidang membawahi seksi – seksi, sedangkan Sekretariat membawahi Sub bagian.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 2 seksi meliputi :

1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh 2 seksi meliputi :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh 2 seksi meliputi :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh 2 seksi meliputi :

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan

Sekretariat dibantu oleh 3 Sub bagian meliputi :

1. Sub bagian Perencanaan
2. Sub bagian Keuangan
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2019

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Struktural :	
	a. Eselon II	0
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	10
2.	Staf	11
3.	Jabatan Fungsional	-
	Jumlah	25

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
berdasarkan Pangkat / Golongan per 31 Desember 2019

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda / IVc	-
2.	Pembina Tingkat I / IVb	1
3.	Pembina / IVa	3
4.	Penata Tingkat I / IIIId	8
5.	Penata / IIIc	3
6.	Penata Muda Tingkat I / IIIb	-
7.	Penata Muda / IIIa	5
8.	Pengatur Tingkat I / IID	4
9.	Pengatur / IIc	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I / IIB	1
11.	Pengatur Muda / IIa	-
12.	Juru Tingkat I / Id	-
13.	Juru / Ic	-
14.	Juru Muda Tingkat I / Ib	-
15.	Juru Muda / Ia	-
Jumlah		25

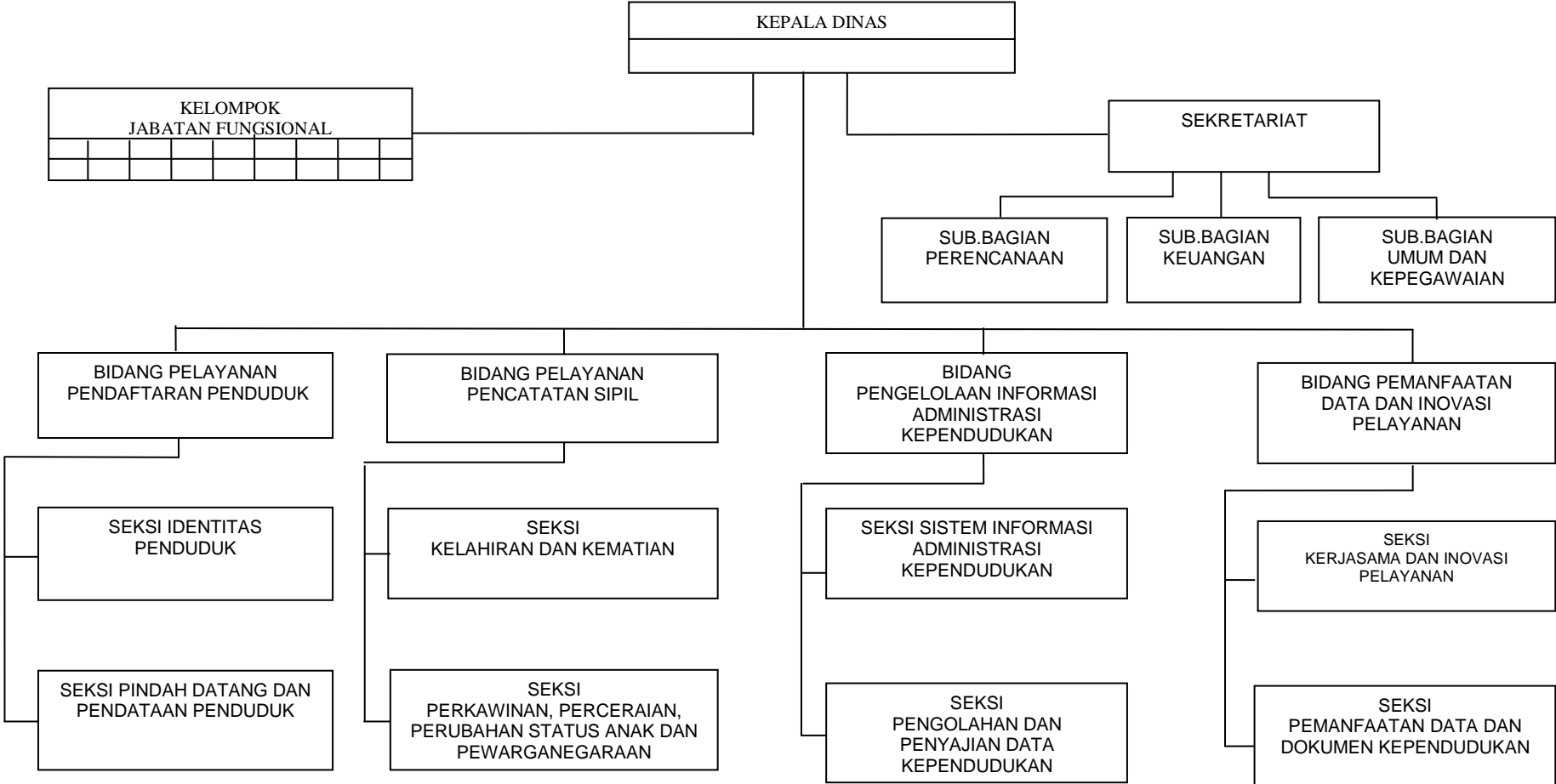
Tabel 1.3
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2019

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca sarjana	1
2.	Sarjana	13
3.	Diploma III	5
4.	SLTA / Sederajat	5
5.	SLTP / Sederajat	1
6.	SD / Sederajat	-
Jumlah		25

Tabel 1.4
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
berdasarkan Jenis kelamin per 31 Desember 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	18
2.	Wanita	7
Jumlah		25

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan telah melaksanakan program / kegiatannya, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi. Beberapa permasalahan dan upaya penyelesaian masalah dapat disebutkan sebagai berikut :

A. PERMASALAHAN

1. Jumlah ketersediaan balngko KTP elektronik sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk keseluruhan permohonan yang ada.
2. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat pada umumnya masyarakat akan mengurus dokumen kependudukannya dan pencatatan sipil apabila membutuhkannya.
3. Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan adalah sulit, berbelit-belit dan lama. Hal ini dikarenakan pengetahuan mereka terhadap persyaratan penerbitan dokumen kependudukan masih kurang. Sedangkan penerbitan dokumen kependudukan membawa konsekwensi hukum, sehingga harus sesuai/memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Kualitas database kependudukan masih perlu perbaikan secara terus menerus, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :
 - a. Belum sinkronnya data kependudukan antara dokumen satu dengan lainnya.
 - b. Masih terdapat data kependudukan yang bersifat ganda serta adanya data penduduk yang bersifat non aktif. Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah melakukan aktifitas kependudukan / bersifat statis selama 5 tahun.
 - c. Masih terdapat akta kelahiran manual yang belum masuk di database kependudukan dan belum digitalisasi arsip. Selain itu juga masih ada akta kelahiran terbitan luar daerah/luar negeri yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jumlah SDM/pegawai di Dukcapil masih kurang, sementara volume pekerjaan yang harus diselesaikan sangat besar. Jumlah pegawai yang ada 51 orang, terdiri dari PNS 25 Orang dan Non PNS 26 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan dokumen kependudukan sebesar 1.298.302 orang.
6. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengamanatkan bahwa penerbitan dokumen kependudukan harus dilaksanakan oleh

instansi pelaksana (Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil) yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan kepada instansi lain. Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Menjauhkan masyarakat dengan pusat pelayanan
- b. Dengan adanya jarak yang jauh menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi dan prosesnya lama.
- c. Penerbitan dokumen kependudukan mensyaratkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka penerbitan dokumen tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu disisi lain masyarakat belum mengerti hal tersebut, sehingga menyebabkan mereka enggan untuk mengurus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana strategis (Renstra OPD) memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD berpedoman pada Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) daerah.

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 merupakan acuan dalam membuat jadwal rencana kerja/kegiatan baik kegiatan yang bersifat rutin maupun proyek. Rencana Strategis Tahunan merupakan penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021.

A. Tujuan dan Indikator Tujuan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban menetapkan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Sedangkan indikator tujuan ditetapkan :

- IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan

B. Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk mewujudkan tujuan “meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas” maka ditetapkan sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator :

- a) Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator :

- a) Persentase Kepemilikan KTP elektronik
- b) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
- c) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
- d) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
- e) Persentase Kepemilikan Akta Kematian
- f) IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator :

- a) Persentase Ketersediaan Informasi Data Kependudukan

C. Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang telah disusun strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi adalah sebagai berikut :

- Untuk sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban, maka ditetapkan :

a) Strategi :

- Memenuhi kebutuhan kesekretariatan serta pemeliharaan sarana prasarana kantor penunjang administrasi perkantoran lainnya
- Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja SumberDaya Manusia aparatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja OPD, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, publikasi informasi kinerja perangkat daerah, penyusunan laporan keuangan OPD

- b) Kebijakan :
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan kesekretariatan dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan
- 2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, maka ditetapkan :
 - a) Strategi :
 - Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan keliling, perekaman di sekolah dan pelayanan massal mandiri
 - Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan melalui revitalisasi dan pemeliharaan ruang pelayanan serta sarana prasarana penunjang lainnya
 - Menerapkan standar manajemen mutu dengan menerapkan standar sesuai ISO 9001:2008 dan meningkatkannya sesuai ISO 9001:2015
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis, penambahan jumlah pegawai dan pengembangan lainnya
 - Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Walaupun di undang-undang diisyaratkan waktu penyelesaian 14 hari tetapi berusaha diselesaikan antara 1-5 hari (bagi yang memenuhi persyaratan lengkap)
 - Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sosialisasi dan orientasi
 - Melaksanakan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi
 - Melaksanakan Pemutakhiran Kartu Keluarga
 - Membangun, memelihara dan Optimalisasi jaringan SIAK, yang saat ini sudah sampai di kecamatan dan meningkatkannya sampai tingkat desa/kelurahan
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur SIAK dengan melaksanakan bimbingan teknis aparatur SIAK
 - b) Kebijakan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat

- Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jaringan SIAK
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, maka ditetapkan
- a) Strategi:
- Melakukan update data secara rutin dan intensif
 - Pengembangan informasi kependudukan melalui teknologi informasi dengan melakukan kerjasama dan konektivitas dengan instansi/stakeholder terkait
 - Bekerjasama dengan pihak operator SIAK (OPSI) yang ada di desa/kelurahan serta kecamatan dalam pengelolaan database kependudukan
- b) Kebijakan:
- Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi

2. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tahun 2018 menyangkut kegiatan – kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program dan pencapaian indikator. Adapun rencana kegiatan sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Perkantoran
2. Penyediaan Peralatan Kantor
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4. Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
6. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur

III. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

IV. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
2. Penerapan Program KTP-el
3. Orientasi Sistem Administrasi Kependudukan bagi pengurus RT dan RW
4. Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk
5. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)
6. Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)

V. Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kegiatan antara lain :

1. Pelayanan Adminduk Capil Keliling
2. Penyimpanan Dokumen dan Perubahan Akta Capil
3. Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)

VI. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan antara lain :

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
3. Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)

VII. Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Database Kependudukan dalam Menunjang Laporan Kependudukan
2. Promosi dan Pameran Kependudukan
3. Fasilitasi Penerapan ISO Bidang Pelayanan

3. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya instansi. Penetapan Kinerja di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019
1	2	3	4
1.	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	92
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	10
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun	%	85
5.	Persentase Kepemilikan Akta kematian	%	20
6.	IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik
7.	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tuban dalam melakukan penilaian kinerja mengacu pada skala peringkat kinerja sebagaimana tabel 3.1. Penilaian ini untuk melihat kinerja yang hasilnya akan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.1

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Ket : berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian indikator kinerja tahun 2019

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13	Sangat Tinggi
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	10	13,63	136,30	Sangat Tinggi
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun	%	85	92,66	109,01	Sangat Tinggi

5.	Persentase Kepemilikan Akta kematian	%	20	79,72	398,60	Sangat Tinggi
6.	IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100	Sangat Tinggi
7.	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan KTP elektronik

Tabel 3.3

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13	Sangat Tinggi

Untuk Indikator kinerja persentase kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2019 telah dapat mencapai target dengan capaian sebesar 92,12% atau 931.188 orang dari wajib KTP 1.010.831 orang. Pencapaian tahun 2019 ini dikategorikan **Sangat Tinggi**. Pencapaian tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jemput bola dengan perekaman penduduk wajib KTP ke desa/kelurahan dan sekolah, serta adanya ketentuan akan dilakukan pemblokiran data penduduk usia 23 tahun keatas yang belum melakukan perekaman. Selain itu pada tahun 2019 juga melaksanakan pencetakan KTP elektronik di pusat oleh PNRI (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia).

2. Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Tabel 3.4

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja kepemilikan Kepala keluarga mencapai 100 % (399.814 KK). Target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2019 telah tercapai dan dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Tuban telah mempunyai Kartu Keluarga, baik Kartu Keluarga yang sudah terintegrasi dengan SIAK maupun yang belum terintegrasi SIAK.

3. Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Tabel 3.5

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	10	13,63	136,30	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2019 capaiannya adalah 13,63 % atau 39.216 lembar dari 287.740 anak. Target untuk indikator kinerja ini telah tercapai dan dikategorikan **sangat tinggi**. Hal tersebut dicapai dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anaknya sebagai identitas resmi anak.

4. Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun

Tabel 3.6

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun	%	85	92,66	109,01	Sangat Tinggi

Pada tahun 2019, Pada tahun 2019, untuk Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun adalah 92,66 % dari target 85 % atau 283.386 anak dari total 305.827 anak, dan target tahun 2019 ini telah tercapai dengan kategori **sangat tinggi**. Hal ini dicapai dengan dilaksanakannya pelayanan sehari jadi atau one day service bagi yang mengurus sendiri akta kelahirannya, dilaksanakannya pelayanan keliling di 20 kecamatan dan juga pelayanan massal mandiri ke desa/kelurahan. Selain itu pada tahun 2019 ini juga mulai dilaksanakannya pelayanan online desa/kel dan kecamatan melalui program "JADEK" atau Jauh Jadi Dekat.

5. Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Akta kematian

Tabel 3.7

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.	Persentase Kepemilikan Akta kematian	%	20	79,72	398,60	Sangat Tinggi

Untuk Indikator Kinerja persentase Kepemilikan Akta Kematian capaiannya sebesar 79,72 % (2.945 akta kematian dari 3.694 jumlah kematian yang terjadi). Untuk indikator kinerja ini tahun 2019 telah tercapai dan dikategorikan **sangat tinggi**. Pada tahun 2019 capaiannya bisa melampaui target karena dalam setiap pengurusan perubahan Kartu Keluarga apabila terjadi pengurangan anggota keluarga karena kematian, diwajibkan juga untuk mengurus akta kematiannya.

6. Indikator Kinerja IKM pelayanan administrasi kependudukan

Tabel 3.8

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
6.	IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100	Sangat Tinggi

Indikator kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pelayanan administrasi kependudukan, dari survey independen yang telah dilakukan maka capaian dari IKM untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban pada Tahun 2019 dicapai nilai 76,90 atau kategori baik. Capaian untuk indikator kinerja ini dikategorikan **Sangat Tinggi**. Target untuk indikator IKM ini telah tercapai. Dengan demikian bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban telah memenuhi standar pelayanan dengan kategori baik sehingga hal ini akan terus dipertahankan.

7. Indikator Kinerja Persentase ketersediaan informasi data kependudukan

Tabel 3.9

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
7.	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Indikator persentase ketersediaan informasi data kependudukan capaiannya adalah 100 %. Indikator kinerja ini telah tercapai dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa laporan informasi tentang data kependudukan yang diminta oleh stakeholder terkait telah dapat dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Capaian indikator kinerja dari tahun 2016 sampai tahun 2019

No	Indikator	sat	2016		2017		2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	87,5	90,52	88	89,68	90	91,64	92	92,12
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	0	0	5	0,43	7,5	4,72	10	13,63
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun	%	77,5	78,07	80	86,20	82,5	88,48	85	92,66
5.	Persentase Kepemilikan Akta kematian	%	5	7,76	10	60,96	15	80,05	20	79,72
6.	IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7.	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan capaian indikator kinerja apabila dibandingkan dengan target dalam perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

No	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	96	92,12	95,96
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	15	13,63	90,87
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun	88	92,66	105,30
5.	Persentase Kepemilikan Akta kematian	35	79,72	227,77
6.	IKM pelayanan administrasi kependudukan	Baik	Baik	100
7.	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	100	100	100

Pencapaian kinerja dibandingkan dengan anggaran serta membandingkan tingkat efisiensinya pada Tahun 2019 terlihat pada tabel 3.12 dan 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	92	92,12	100,13	4.053.308.700	3.553.543.728	87,67 %
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100			
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	10	13,63	136,30			
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 tahun	85	92,66	109,01			
	Persentase Kepemilikan Akta kematian	20	79,72	398,60			
	IKM pelayanan administrasi kependudukan	Baik	Baik	100			
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	100	100	100	208.400.000	185.262.300	88,90 %

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2019		
		Capaian Kinerja	% penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	157,34	87,67	69,67
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga			
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun			
	Persentase Kepemilikan Akta kematian			
	IKM pelayanan administrasi kependudukan			
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	100	88,90	11,10

Adapun untuk mencapai indikator kinerja tersebut didukung oleh program dan kegiatan antara lain:

I. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
2. Penerapan Program KTP-el
3. Orientasi Sistem Administrasi Kependudukan bagi pengurus RT dan RW
4. Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk
5. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)
6. Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)

II. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan :

1. Pelayanan Adminduk Capil Keliling
2. Penyimpanan Dokumen dan Perubahan Akta Capil
3. Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)

III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
3. Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)

IV. Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan :

1. Pengembangan Database Kependudukan dalam Menunjang Laporan Kependudukan
2. Promosi dan Pameran Kependudukan
3. Fasilitasi Penerapan ISO Bidang Pelayanan

Dalam pencapaian target dari indikator tersebut, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa solusi/terobosan antara lain:

- Melakukan kegiatan pelayanan keliling dan Pelayanan massal mandiri ke desa/kelurahan dan sekolah
- Pelayanan sehari jadi bagi yang diurus sendiri
- Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi
- MOU dengan instansi terkait
- Program "JADEK" atau Jauh Jadi Dekat, yaitu pelayanan dengan cara lewat on line (verifikasi, entri dan scan berkas lewat desa/kecamatan)
- Melaksanakan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerapkan standar pelayanan sesuai ISO 9001:2015
- Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.

Capaian pelayanan penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.14 dan tabel 3.15.

Tabel 3.14

Data Hasil Pelayanan KTP elektronik, Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik, KK, dan Surat Pindah Tahun 2018 – 2019

NO	URAIAN	Satuan	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Perkembangan (%)
I	Pelayanan				
1.	KTP elektronik	Lembar	108.843	54.524	-49,91
2.	Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik	Lembar	6.554	30.033	358,24
3.	KK	Lembar	108.050	92.503	-14,39
4.	Surat Pindah	Lembar	14.288	7.914	-44,61
5.	Kartu Identitas Anak	Lembar	12.357	25.606	107,22
6.	SKTT	Lembar	71	15	

Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2019

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa pelayanan KTP elektronik mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 108.843 lembar menjadi 54.524 lembar di tahun 2019. Hal ini dikarenakan blangko KTP elektronik yang diterima dari direktorat administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil jumlahnya sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka diterbitkanlah Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik dimana pelayanan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik ini, dimana penerbitannya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 6.554 sedangkan tahun 2019 sebanyak 30.033 lembar. Untuk Pelayanan KK mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 108.050 lembar sedangkan pada tahun 2019 yaitu 92.503 lembar. Pelayanan surat pindah mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 14.228 lembar, dan tahun 2019 sebanyak 7.914 lembar. Pelayanan Kartu Identitas Anak atau KIA pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian sebanyak 12.357 lembar sedangkan di tahun 2019 sebanyak 25.606. Hal ini dikarenakan para orang tua banyak yang menguruskan KIA bagi anak-anaknya sebagai identitas resmi anak-anaknya. Pelayanan SKTT mengalami penurunan dari 71 lembar di tahun 2018 menjadi 15 lembar di tahun 2019.

Tabel 3.15

Data hasil pelayanan Akta dan PAD Akta Capil pada tahun 2018 – 2019

NO	URAIAN	Satuan	Tahun		Perkembangan (%)
			Tahun 2018	Tahun 2019	
I	Pelayanan Akta	Lembar			I
1.	Akta Kelahiran	Lembar	21.861	20.297	1.
2.	Akta Perkawinan	Lembar	23	21	2.
3.	Akta Perceraian	Lembar	11	13	3.
4.	Akta Kematian	Lembar	5.011	3.696	4.
5.	Akta Lain-lain	Lembar	6.064	6.083	5.
	Jumlah		32.970	30.110	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2018 - 2019

Dari table 3.15 dapat dilihat pelayanan akta – akta capil secara umum mengalami penurunan sebesar 8,67 % dari tahun 2018 yaitu 32.970 lembar sedangkan tahun 2019 yaitu 30.110 lembar. Penurunan yang signifikan terjadi pada pelayanan akta kematian yang menurun 26,24 %, dimana pada tahun 2018 sebesar 5.011 lembar menjadi 3.696 lembar di tahun 2019. Penurunan terjadi juga pada pelayanan akta kelahiran dan akta perkawinan yang masing-masing penurunannya sebesar 7,15 % dan 8,70 %.

Sedangkan kenaikan terjadi pada pelayanan akta perceraian yaitu sebesar 18,18 %, dan kenaikan terjadi pula pada pelayanan akta lain-lain (akta perubahan, akta pembetulan dan kutipan kedua akta kelahiran) sebesar 0,31 %, dimana pada tahun 2018 sebanyak 6.064 lembar dan pada tahun 2019 sebanyak 6.083 lembar. Berdasarkan data ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang sadar untuk mengurus apabila ada perubahan pada dokumen akta pencatatan sipilnya. Untuk pelayanan akta capil selain dilaksanakan pada saat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi juga dilaksanakan dengan pelayanan keliling serta pelayanan massal mandiri ke desa/kelurahan, terutama pelayanan akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun yang merupakan salah satu fokus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena menjadi program nasional.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2018 dan 2019 per kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.17, sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.16. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban jumlahnya terjadi peningkatan dari tahun 2018 yaitu 1.285.147 jiwa menjadi 1.298.302 jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki meningkat dari 644.151 jiwa pada tahun 2018 menjadi 650.788 pada tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan jumlahnya yaitu 640.996 jiwa pada tahun 2018 menjadi 647.514 jiwa pada tahun 2019.

Tabel 3.16
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2018 – 2019

NO	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Perkembangan (%)
1.	Laki Laki	Jiwa	644.151	650.788	1,03
2.	Perempuan	Jiwa	640.996	647.514	1,01
	Jumlah		1.285.147	1.298.302	1,02

Tabel 3.17

Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban per Kecamatan Tahun 2018 – 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan
1	KENDURUAN	30.544	30.857	
2	JATIROGO	59.638	60.140	
3	BANGILAN	52.375	52.668	
4	BANCAR	61.233	61.892	
5	SENORI	45.383	45.759	
6	TAMBAKBOYO	44.096	44.530	
7	SINGGAHAN	45.055	45.496	
8	KEREK	74.583	75.328	
9	PARENGAN	59.224	59.913	
10	MONTONG	57.058	57.556	
11	SOKO	89.359	90.668	
12	JENU	57.686	58.724	
13	MERAKURAK	61.358	62.182	
14	RENGEL	63.615	64.106	
15	SEMANDING	118.995	120.486	
16	TUBAN	91.393	91.980	
17	PLUMPANG	85.225	85.811	
18	PALANG	92.198	93.196	
19	WIDANG	54.389	54.676	
20	GRABAGAN	41.740	42.334	
	JUMLAH	1.285.147	1.298.302	

Tabel 3.18
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH KK	REALISASI PEREKAMAN KTP-el	Kepemilikan KTP-el
1	KENDURUAN	30.857	24.583	9.505	23.527	22.590
2	JATIROGO	60.140	47.244	18.213	45.948	44.075
3	BANGILAN	52.668	40.833	16.157	38.554	37.447
4	BANCAR	61.892	48.543	18.986	46.478	46.223
5	SENONI	45.759	35.546	13.905	33.369	32.229
6	TAMBAKBOYO	44.530	34.331	13.567	32.647	31.919
7	SINGGAHAN	45.496	35.433	14.606	32.989	32.006
8	KEREK	75.328	61.512	22.562	54.466	53.209
9	PARENGAN	59.913	47.586	19.033	44.013	42.096
10	MONTONG	57.556	45.864	17.149	43.772	41.611
11	SOKO	90.668	71.225	28.792	68.519	65.722
12	JENU	58.724	44.770	17.696	41.451	42.073
13	MERAKURAK	62.182	48.722	18.643	46.199	46.234
14	RENGEL	64.106	49.700	19.793	48.660	47.445
15	SEMANDING	120.486	92.632	36.820	85.502	85.695
16	TUBAN	91.980	69.883	28.195	68.693	66.611
17	PLUMPANG	85.811	65.799	26.969	62.709	61.035
18	PALANG	93.196	70.610	28.321	64.807	63.917
19	WIDANG	54.676	42.417	16.720	39.338	38.122
20	GRABAGAN	42.334	33.598	14.182	31.270	30.929
	Jumlah	1.298.302	1.010.831	399.814	952.911	931.188

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari perekaman KTP-el Kabupaten Tuban pada tahun 2019 telah mencapai 952.911 jiwa atau 94,27% dari wajib KTP 1.010.831 jiwa, serta penduduk yang telah memiliki KTP-el yaitu 931.188 orang atau 92,12 %.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran.

Program ini meliputi 6 kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Perkantoran, kegiatan ini ditujukan untuk honorarium Non PNS tenaga kebersihan (4 orang), belanja bahan pembersih, pembayaran telepon, listrik, pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan untuk peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.348.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.297.478.747,-.
- Penyediaan peralatan kantor, kegiatan ini dilaksanakan untuk belanja alat tulis kantor, alat listrik, surat kabar/majalah, cetak dan penggandaan, penjilidan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.357.500 dan realisasinya adalah Rp. 175.378.300,-.
- Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, kegiatan ini untuk pengadaan kursi rapat 50 unit, AC 1 unit, kursi tunggu 12 unit, printer 1 unit, printer dotmatrik 4 unit. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 63.600.000,- dan terealisasi Rp. 58.152.700,-.
- Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran, dengan sasaran pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan peralatan gedung kantor dan pemeliharaan meubelair. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 226.000.000,- dan terealisasi Rp. 204.450.427,-.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, ditujukan untuk menyediakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka untuk melaksanakan rapat koordinasi serta konsultasi, dengan anggaran Rp. 228.550.000,- dan terealisasi Rp. 133.486.548,-.
- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ditujukan untuk menyediakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kegiatan ini berasal dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan anggaran Rp. 482.348.000,- dan terealisasi Rp. 329.594.060,-.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Dalam pelaksanaannya program ini melalui 2 kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan sasaran pengadaan pakaian sipil harian/PSH (6 stel), pakaian dinas harian /PDH (29 stel), Pakaian Hitam Putih (30 stel) dan Pakaian Olah Raga (59 stel) yang diperuntukkan bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dengan alokasi anggaran Rp. 41.100.000,- dan terealisasi Rp. 37.983.500,-.
- Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur, yang dipergunakan untuk honorarium instruktur senam, belanja premi kesehatan non PNS, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja non PNS, Iuran Jaminan Kematian non PNS belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas keluar daerah, belanja kontribusi peserta pelatihan, dengan anggaran Rp. 126.716.040,- dan terealisasi sebesar Rp.89.338.001,-.

3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Program ini meliputi 2 kegiatan yaitu:

- Koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah, yang dipergunakan untuk lembur pegawai, makanan dan minuman, penggandaan dan penjilidan, belanja perjalanan dinas keluar daerah dan belanja jasa kontribusi peserta pelatihan dalam rangka untuk penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp. 60.225.000,- dan terealisasi Rp. 47.348.555,-.
- Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah, yang ditujukan untuk honorarium pengelola keuangan perangkat daerah, belanja materai, jasa transaksi keuangan, cetak dan penjilidan dengan anggaran sebesar Rp.136.495.000,- dengan realisasi Rp.125.600.000,-.

4. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pada Tahun Anggaran 2019 program ini meliputi 6 kegiatan yaitu :

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, kegiatan ini ditujukan untuk pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang digunakan untuk honorarium Non PNS (25 orang) serta lembur pegawai untuk pelayanan administrasi kependudukan. Selain

itu kegiatan ini ditujukan juga untuk belanja tinta/ribbon untuk KIA. Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 532.823.700,- dan realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp. 477.955.500,-.

- Penerapan Program KTP-el dengan sasaran pelayanan KTP elektronik untuk seluruh lapisan masyarakat se Kabupaten Tuban serta, perekaman mobile ke desa/sekolah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 108.000.000 dan realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp 94.117.500,-.
- Orientasi Sistem Administrasi kependudukan bagi Pengurus RT dan RW dengan sasaran RT dan RW agar terwujud kesadaran dan pemahaman penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukannya dan memiliki dokumen kependudukan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.860.000,-
- Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk, ditujukan untuk pengarsipan berkas pendaftaran penduduk untuk di simpan/arsip di gudang arsip. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.371.500,-.
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran 1000 peserta sosialisasi serta pengadaan baliho pelayanan administrasi kependudukan dan belanja jasa media elektronik. Kegiatan ini berasal dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan anggaran Rp. 450.000.000,- dan terealisasi Rp. 436.295.000,-.
- Penerbitan Dokumen Kependudukan dengan sasaran pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tuban, serta blangko administrasi kependudukan dan capil (blangko KK, kutipan akta, buku register), cetak formulir pendaftaran penduduk, cetak KTP el, cetak blangko KIA. Kegiatan ini berasal dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan anggaran Rp.1.670.553.000,- dan terealisasi Rp. 1.629.260.143,70,-.

5. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program ini pada Tahun 2019 ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan antara lain:

- Pelayanan Adminduk Capil Keliling dengan sasaran pelayanan dokumen adminduk dan akte-akte capil di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban secara keliling. Pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.000.000,- dengan realisasi Rp. 98.372.000,-.
- Penyimpanan Dokumen dan Perubahan Akta Capil. Kegiatan ini dengan sasaran terlaksananya penyimpanan dokumen/arsip akta-akta catatan sipil di 2 gedung arsip, serta pengadaan rak arsip 6 unit untuk menyimpan dokumen/arsip akta-akta catatan sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000,-. Untuk kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 64.387.000,-.
- Pelayanan Dokumen Kependudukan yang ditujukan untuk pelayanan massal mandiri ke desa/kel se Kabupaten Tuban serta perekaman secara keliling. Kegiatan ini berasal dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan anggaran Rp.294.632.000,- dan terealisasi Rp. 58.350.000,-. Anggaran pada kegiatan ini penyerapannya belum maksimal dikarenakan alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelayanan massal mandiri dan perekaman keliling ke desa/kel realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada atau sesuai permintaan dari desa/kel yang bersangkutan.

6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini pada Tahun 2019 dilaksanakan meliputi 4 kegiatan:

- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dengan sasaran penyediaan sarana pembangunan dan pengoperasian SIAK, pengadaan aplikasi system informasi manajemen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengadaan peralatan M2M dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90.000.000,- dan realisasi kegiatan ini sebesar Rp 83.796.000,-.
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun updating, dan pemeliharaan) dengan sasaran pemeliharaan peralatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 20 kecamatan, pembayaran jasa telepon (internet dan VPN) serta honor operator SIAK kecamatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 197.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 176.947.085,-.

- Pengolahan dan Penyusunan laporan Informasi Kependudukan dengan sasaran terlaksananya laporan administrasi kependudukan yang akurat, pengadaan buku laporan kependudukan dengan anggaran Rp. 26.000.000,- dengan realisasi kegiatan ini keseluruhan Rp. 22.016.000,-.
 - Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran pemeliharaan jaringan SIAK di 20 kecamatan serta cetak buku profil kependudukan dan buku penduduk per semester. Kegiatan ini berasal dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan anggaran Rp.263.300.000,- dan terealisasi Rp 184.816.000,-. Pada kegiatan ini untuk anggaran pemeliharaan penyerapannya belum maksimal karena pada pemeliharaan jaringan SIAK di kecamatan menyesuaikan peralatan jaringan yang rusak.
7. Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Program ini pada Tahun 2018 dilaksanakan meliputi 3 kegiatan:
- Pengembangan Database Kependudukan dalam menunjang Laporan Kependudukan dengan sasaran Up dating database kependudukan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.702.300,-
 - Promosi dan Pameran Kependudukan. Kegiatan ini tujuan untuk lebih memperkenalkan beragam pelayanan kependudukan kepada masyarakat melalui pameran kependudukan. Dalam pameran ini juga melayani berbagai keperluan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi Rp. 25.490.000,-.
 - Fasilitasi Penerapan ISO Bidang Pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan. Hal itu dengan dilaksanakannya pendampingan dari konsultan serta audit dari badan sertifikasi ISO 9001:2015. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.78.000.000,- terealisasi Rp. 71.070.000,-.

Tabel 3.2
Hasil Pelaksanaan/Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)			Capaian Target Output / Keluaran
		Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan jasa Perkantoran	348.400.000,00	297.478.747,00	85,38	Jumlah jasa administrasi perkantoran (7 jenis jasa administrasi perkantoran).
2.	Penyediaan peralatan kantor	179.357.500,00	175.378.300,00	97,78	Jumlah peralatan perkantoran yang disediakan (5 jenis peralatan perkantoran)
3.	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	63.600.000,00	58.152.700,00	91,44	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (2 jenis)
4.	Pemeliharaan rutin sarana prasarana perkantoran	226.000.000,00	204.450.427,00	90,46	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara (R2 28 unit, R4 4 unit, gedung 13 unit)
5.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	228.550.000,00	133.486.548,00	58,41	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan (50 kali)
6.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	482.348.000,00	329.594.060,00	68,33	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan (50 kali)
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	41.100.000,00	37.983.500,00	92,42	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (PSH 6 stel, pakaian dinas harian /PDH 29 stel, Pakaian Hitam Putih 30 stel dan Pakaian Olah Raga 59 stel)
2.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	126.716.040,00	89.338.001,00	70,50	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi (29 PNS, 30 Non PNS, 1 instruktur senam)

3.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	60.225.000,00	47.348.555,00	78,62	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah (6 jenis dokumen)
2.	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	136.495.000,00	125.600.000,00	92,02	Jumlah dokumen Dokumen Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (9 jenis dokumen)
4.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
1.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	532.823.700,00	477.955.500,00	89,70	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (200.000 dokumen kependudukan)
2.	Penerapan Program KTP-el	108.000.000,00	94.117.500,00	87,15	Persentase pelayanan KTP elektronik (92%)
3.	Orientasi Sistem Administrasi Kependudukan bagi Pengurus RT dan RW	150.000.000,00	148.860.000,00	99,24	Jumlah RT dan RW yang melaksanakan orientasi (700 orang)
4.	Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk	85.000.000,00	78.371.500,00	92,20	Jumlah berkas pendaftaran penduduk yang diarsip (100.000 berkas)
5.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	450.000.000,00	436.295.000,00	96,95	jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1.000 orang)
6.	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	1.670.553.000,00	1.629.260.143,70	97,53	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (200.000 dokumen kependudukan)
5.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				
1.	Pelayanan Adminduk Capil Keliling	106.000.000,00	98.372.000,00	92,80	Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan (40 kali)
2.	Penyimpanan Dokumen dan Perubahan Akta Capil	80.000.000,00	64.387.000,00	80,48	Jumlah berkas akta pencatatan sipil yang tersimpan (25.000 berkas)

3.	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	294.632.000,00	58.350.000,00	19,80	Jumlah pelayanan kependudukan yang dilaksanakan (150 kali)
6.	Program Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan				
1.	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	90.000.000,00	83.796.000,00	93,11	Jumlah jaringan SIAK yang dioperasikan dan dipelihara (1 jaringan)
2.	Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating, Dan Peeliharaan)	197.000.000,00	176.947.085,00	89,82	Jumlah implementasi titik jaringan SIAK (20 titik)
3.	Pengolahan dan Penyusunan laporan informasi kependudukan	26.000.000,00	22.016.000,00	84,68	Jumlah laporan yang tersusun (25 buku laporan)
4.	Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)	263.300.000,00	184.816.000,00	70,19	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola (1 sistem informasi)
7.	Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	Pengembangan Database Kependudukan dalam Menunjang laporan Kependudukan	100.400.000,00	88.702.300,00	88,35	Jumlah kecamatan dan desa/kel yang melakukan entri data base kependudukan (20 kec, 328 desa/kel)
2.	Promosi dan Pameran Kependudukan	30.000.000,00	25.490.000,00	84,97	Jumlah promosi dan pameran kependudukan (1 kali)
3.	Fasilitasi Penerapan ISO bidang Pelayanan	78.000.000,00	71.070.000,00	91,12	Jumlah sertifikat ISO (1 sertifikat)
	JUMLAH	5.154.500.240,00	5.237.616.866,70	85,10	

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 ini disusun sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban instansi publik dalam melaksanakan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun yang didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) kurun waktu 5 tahunan (2016 – 2021) yang telah disusun sebelumnya.

Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi Pemerintah secara tertulis LAKjIP 2019 juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan LPJ Bupati Tuban akhir tahun 2019 dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencakup semua kegiatan baik yang bersifat rutin maupun proyek dengan dana APBD Kabupaten Tuban, sesuai data yang telah disajikan dalam isi LAKjIP tahun 2019.

Secara umum pencapaian dari indikator kinerja utama telah tercapai seluruhnya dengan kategori sangat tinggi. Adapun capaian dari masing-masing indikator di tahun 2019 adalah Indikator persentase kepemilikan KTP elektronik capaiannya 92,12 %, persentase kepemilikan kartu keluarga capaiannya 100 %, persentase kepemilikan kartu identitas anak capaiannya 13,63%, persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun capaiannya 92,66 % dan persentase kepemilikan akta kematian capaiannya 79,72 %. Untuk indikator IKM pelayanan administrasi kependudukan capaiannya Baik, sedangkan indikator persentase ketersediaan informasi data kependudukan dengan capaian 100 %.


Dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memang masih menghadapi kendala atau permasalahan. Untuk itu beberapa solusi atau pemecahan yang dilaksanakan antara lain:

1. Dalam memberikan pelayanan penerbitan KTP elektronik, maka dilakukan:
 - a. Secara aktif berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam hal permasalahan penerbitan KTP elektronik.
 - b. Untuk menjamin agar penduduk dapat terlayani kepentingannya maka diterbitkan Surat Keterangan pengganti KTP elektronik.
 - c. Mengalokasikan anggaran percetakan KTP elektronik dipusat secara kolektif.

2. Melaksanakan sosialisasi secara intensif baik melalui tatap muka maupun media cetak/elektronik terkait pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta prosedur permohonannya.
3. Melaksanakan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta menerapkan standar pelayanan sesuai ISO 9001:2015
4.
 - a. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya perubahan elemen data penduduk sesuai kondisi yang ada serta identitas tunggal penduduk.
 - b. Melaksanakan up date data secara rutin dan berkesinambungan
 - c. Melaksanakan konversi data akta kelahiran manual kedalam database kependudukan dan digitalisasi arsip, juga secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menginformasikan tentang pelaporan akta kelahiran terbitan luar daerah/luar negeri.
5. Terkait dengan keterbatasan sumberdaya manusia, maka dilakukan:
 - a. Penambahan tenaga Non PNS
 - b. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kemampuan kualitas tenaga Non PNS melalui pembinaan, evaluasi kerja.
4. Menerapkan inovasi pelayanan dibidang penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya :
 - a. Melaksanakan pelayanan pengurusan Kartu Keluarga dan KTP di kecamatan
 - b. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat jemput bola antara lain meliputi pelayanan mobil keliling di 20 kecamatan, pelayanan massalmandiri ke desa/kelurahan serta perekaman di sekolah-sekolah untuk wajib KTP pemula dan perekaman bagi kaum lansia, disabilitas dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa).
 - c. Program pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa melalui program "JADEK" atau Jauh Jadi Dekat, yaitu pelayanan dengan cara lewat on line (verifikasi, entri dan scan berkas lewat desa) serta lewat telegram.
 - d. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.

Akhirnya diharapkan LAKjIP tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan program di masa mendatang sehingga dapat terjadi peningkatan pelayanan masyarakat dari instansi dan pejabat publik.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN



Drs. ROHMAN UBAID
Pembina Tk. I
TNIP 19671105 198911 1 001

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021**

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		K E T
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban</p> <p>2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan</p>	<p>1. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban</p> <p>1. persentase kepemilikan KTP elektronik (%)</p> <p>2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (%)</p> <p>3. persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)</p> <p>4. persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun (%)</p> <p>5. Persentase kepemilikan akta kematian (%)</p> <p>6. IKM pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>7. Persentase ketersediaan informasi data kependudukan</p>	<p>1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan kesekretariatan dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan</p>	<p>1. Program pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>3. Program peningkatan disiplin aparatur</p> <p>4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur</p> <p>5. Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja SKPD</p> <p>6. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</p> <p>7. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</p> <p>8. Program pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>9. Program pelayanan pencatatan sipil</p> <p>10. Program pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan</p> <p>11. Program pemanfaatan data dan pengembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil</p>	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN

NO	SASARAN					Program	KEGIATAN				Ket
	Uraian	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	1. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Nilai Peringkat	BB	BB	Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Perkantoran Penyediaan peralatan kantor Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah jasa administrasi perkantoran Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang disediakan Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Rp jasa Nilai Peringkat Rp jenis Nilai Peringkat Rp jenis R2 28 unit, R4 4 unit, 13 gedung Nilai Peringkat Rp jenis Nilai Peringkat Rp kali Rp kali Rp kali Nilai Peringkat	348.400.000 7 BB 179.357.500 5 BB 226.000.000 R2 28 unit, R4 4 unit, 13 gedung BB 63.600.000 2 BB 228.550.000 50 BB 482.348.000 50 BB	

						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah pakaian PSH, PDH , Hitam putih, olah raga	Rp PSH PDH Hitam putih olah raga	41.100.000 6 29 30 59	
								Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	
							Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi	Rp org	126.716.040 29 PNS,30 non PNS, 1 instruktur senam	
								Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	
						Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp dokumen	60.225.000 6	
								Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	
							Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah dokumen Dokumen Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp jenis	136.495.000 9	
								Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. persentase kepemilikan KTP elektronik 2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3. persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak 4. persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun 5. Persentase kepemilikan akta kematian 6. IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % % % %	91,64 100 4,72 88,48 80,05 Baik	92 100 10 85 20 Baik	Program pelayanan pendaftaran penduduk	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Rp dok duk	532.823.700 200.000	
								Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % %	92 100 10 Baik	

						Penerapan Program KTP-el	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase pelayanan KTP elektronik	Rp %	108.000.000 92	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 IKM pelayanan administrasi kependudukan	%	92 Baik	
						Orientasi sistem administrasi kependudukan bagi pengurus RT dan RW	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah peserta orientasi sistem administrasi kependudukan bagi pengurus RT dan RW yang	Rp org	150.000.000 700	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % %	92 100 10 Baik	
						Pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : jumlah berkas dokumen pendaftaran penduduk yang diarsip	Rp berkas	85.000.000 100.000	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % %	92 100 10 Baik	
						Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (DAK)	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : jumlah peserta Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	Rp org	450.000.000 1.000	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % %	92 100 10 Baik	
						Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Rp org	1.670.553.000 200.000	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % %	92 100 10 Baik	
					Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Adminduk Capil Keliling	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan	Rp kali	106.000.000 40	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 2 Persentase kepemilikan akta kematian 3 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % %	85 20 Baik	

						Penyimpanan dokumen dan perubahan akta capil	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah berkas akta capil yang tersimpan	Rp berkas	80.000.000 25.000	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 2 Persentase kepemilikan akta kematian 3 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % %	85 20 Baik	
						Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah pelayanan kependudukan yang dilaksanakan	Rp kali	294.632.000 150	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 2 Persentase kepemilikan akta kematian 3 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % %	85 20 Baik	
					Program pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah titik yang terbangun dan mengoperasikan jaringan SIAK	Rp titik	90.000.000 1	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 5 Persentase kepemilikan akta kematian 6 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % % % %	92 100 10 85 20 Baik	
						Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangunan, Updating, Dan Peeliharaan)	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah implementasi titik jaringan SIAK	Rp	197.000.000	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 5 Persentase kepemilikan akta kematian 6 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % % % %	92 100 10 85 20 Baik	
						Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah laporan yang tersusun	Rp buku	26.000.000 25	
							Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 3 Persentase kepemilikan KIA 4 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 5 Persentase kepemilikan akta kematian 6 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% % % % % %	92 100 10 85 20 Baik	

3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	7. Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100	Program	Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)	Masukan : Jumlah Dana	Rp	263.300.000	
								Keluaran : Jumlah laporan yang tersusun	sistem	1	
								Hasil : 1 Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	
								2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	
								3 Persentase kepemilikan KIA	%	10	
								4 Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	
	5 Persentase kepemilikan akta kematian	%	20								
	6 IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik								
							Pengembangan database kependudukan dalam menunjang laporan kependudukan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	100.400.000	
								Keluaran : Jumlah kecamatan dan desa/kel yang melakukan entri database kependudukan	kec dan desa/kel	348	
								Hasil : 1 Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	
							Promosi dan pameran kependudukan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	30.000.000	
								Keluaran : Jumlah promosi dan pameran kependudukan	kali	1	
								Hasil : 1 Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	
							Fasilitasi penerapan ISO bidang pelayanan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	78.000.000	
								Keluaran : Jumlah sertifikat ISO	sertifikat	1	
								Hasil : 1 Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	

**LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2019**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	Target 2019	Program & Kegiatan	Rincian Anggaran (Rp)		
			Kegiatan	Program	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban 1. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban	BB	1. Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa Perkantoran 2. Penyediaan peralatan kantor 3. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran 4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 2. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur 3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	 348.400.000 179.357.500 226.000.000 63.600.000 228.550.000 482.348.000 41.100.000 126.716.040 60.225.000 136.495.000	1.528.255.500 167.816.040 196.720.000	1.892.791.540

2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan		1. Program pelayanan pendaftaran penduduk		2.996.376.700	4.053.308.700
1. Persentase kepemilikan KTP elektronik (%)	92	1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	532.823.700		
2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (%)	100	2. Penerapan Program KTP-el	108.000.000		
3. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	10,0	3. Orientasi Sistem Administrasi Kependudukan bagi Pengurus RT dan RW	150.000.000		
4. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun (%)	85	4. Pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk	85.000.000		
5. Persentase kepemilikan akta kematian (%)	20	5. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (DAK)	450.000.000		
6. IKM pelayanan administrasi kependudukan	Baik	6. Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	1.670.553.000		
		2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil		480.632.000	
		1. Pelayanan Adminduk Capil Keliling	106.000.000		
		2. Penyimpanan dokumen dan perubahan akta capil	80.000.000		
		3. Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	294.632.000		

<p>3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan</p> <p>1. Persentase ketersediaan informasi data kependudukan (%)</p>	<p>100</p>	<p>3. Program pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan</p> <p>1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu</p> <p>2. Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangunan, Updating, Dan Peeliharaan)</p> <p>3. Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan</p> <p>4. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)</p> <p>4. Program pemanfaatan data dan pengembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>1. Pengembangan database kependudukan dalam menunjang laporan kependudukan</p> <p>2. Promosi dan pameran kependudukan</p> <p>3. Fasilitasi penerapan ISO bidang pelayanan</p>	<p>90.000.000</p> <p>197.000.000</p> <p>26.000.000</p> <p>263.300.000</p> <p>100.400.000</p> <p>30.000.000</p> <p>78.000.000</p>	<p>576.300.000</p> <p>208.400.000</p>	<p>208.400.000</p>
---	------------	--	--	---------------------------------------	--------------------

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			Capaian 2019 dibandingkan Capaian 2018	Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	(8)=(7/4)	(9)
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan								
1 Persentase Kepemilikan KTP elektronik	90,00	91,64	101,82	92,00	92,12	100,13	0,98	
2 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	
3 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	7,50	4,72	62,93	10,00	13,63	136,30	8,60	
4 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	82,50	88,48	107,25	85,00	92,66	109,01	1,02	
5 Persentase Kepemilikan Akta Kematian	15,00	80,05	533,67	20,00	79,72	398,60	0,75	
6 IKM pelayanan administrasi kependudukan	Baik	Baik	100,00	Baik	Baik	100,00	1,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan								
7 Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2019**

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Form PKK

NO	PROGRAM	KEGIATAN					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Target	Keterangan
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1 Penyediaan jasa Perkantoran	Masukan : Jumlah dana	Rp	348.400.000	297.478.747,00	85,38	Disdukcapil
			Keluaran : Jumlah jasa administrasi perkantoran	jasa	7	7	100,00	
			Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
		1.2 Penyediaan peralatan kantor	Masukan : Jumlah dana	Rp	179.357.500	175.378.300,00	97,78	
			Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang disediakan	jenis	5	5	100,00	
			Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
		1.3 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran	Masukan : Jumlah dana	Rp	226.000.000	204.450.427	90,46	
			Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	jenis	R2 28 unit, R4 4 unit, 13 gedung	R2 28 unit, R4 4 unit, 13 gedung	100,00	
			Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
		1.4 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Masukan : Jumlah dana	Rp	63.600.000	58.152.700,00	91,44	
			Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	jenis	2	2	100,00	
			Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
		1.5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan : Jumlah dana	Rp	228.550.000	133.486.548	58,41	
			Keluaran : Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	org	60	83	138,33	
			Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
		1.6 Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	Masukan : Jumlah dana	Rp	482.348.000	329.594.060	68,33	
			Keluaran : Jumlah Jumlah Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan	org	60	83	138,33	
			Hasil : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	

2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	2.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan	: Jumlah dana	Rp	41.100.000	37.983.500	92,42	Disdukcapil
			Keluaran	: Jumlah pakaian PSH, PDH , Hitam putih, olah raga	PSH	6	6	100,00	
					PDH	29	28	96,55	
				Hitam Putih	30	27	90,00		
				Olah Raga	59	53	89,83		
		Hasil	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00		
2.2 Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	Masukan	: Jumlah dana	Rp	126.716.040	89.338.001	70,50			
	Keluaran	: Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi	kali	29 PNS,30 non PNS, 1 instruktur senam	30 PNS,30 non PNS, 1 instruktur senam	100,00			
	Hasil	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00			
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	3.1 Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan	: Jumlah dana	Rp	60.225.000	47.348.555	78,62	Disdukcapil
			Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	6	6	100,00	
			Hasil	: Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
		3.2 Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Masukan	: Jumlah dana	Rp	136.495.000	125.600.000	92,02	
			Keluaran	: Jumlah dokumen Dokumen Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat	dok	9	9	100,00	
			Hasil	: Nilai AKIP Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban	Nilai Peringkat	BB	BB	100,00	
4	Program pelayanan pendaftaran penduduk	4.1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Masukan	: Jumlah dana	Rp	532.823.700	477.955.500,00	89,70	Disdukcapil
			Keluaran	: Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	dok	200.000	210.595	105,30	
		Hasil	1 Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13		
			2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100,00		
			3 Persentase kepemilikan KIA	%	10	13,63	136,30		
4 IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00					

		4.2 Penerapan Program KTP-el	Masukan	: Jumlah dana	Rp	108.000.000	94.117.500	87,15	Disdukcakil	
			Keluaran	: Persentase pelayanan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13		
			Hasil	1 Persentase kepemilikan KTP elektronik 2 IKM pelayanan administrasi kependudukan	% Baik	92 Baik	92,12 Baik	100,13 100,00		
		4.3 Orientasi sistem administrasi kependudukan bagi pengurus RT dan RW		Masukan	: Jumlah dana	Rp	150.000.000	148.860.000,00	99,24	Disdukcakil
					Keluaran	: Jumlah peserta orientasi sistem administrasi kependudukan bagi pengurus RT dan RW yang dilaksanakan	org	700	700	
				Hasil	1 Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13	
					2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100,00	
		4.4 Pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk		Masukan	: Jumlah dana	Rp	85.000.000	78.371.500,00	92,20	Disdukcakil
					Keluaran	: jumlah berkas dokumen pendaftaran penduduk yang diarsip	berkas	100.000	162.870	
				Hasil	1 Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13	
					2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100,00	
		4.5 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (DAK)		Masukan	: Jumlah dana	Rp	450.000.000	436.295.000,00	96,95	Disdukcakil
Keluaran	: jumlah peserta Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil				berkas	1.000	1.000	100,00		
Hasil	1 Persentase kepemilikan KTP elektronik			%	92	92,12	100,13			
	2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga			%	100	100	100,00			
4.6 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)		Masukan	: Jumlah dana	Rp	1.670.553.000	1.629.260.143,70	97,53	Disdukcakil		
			Keluaran	: jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	berkas	200.000	210.595		105,30	
		Hasil	1 Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13			
			2 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100,00			
			3 Persentase kepemilikan KIA	%	10	13,63	136,30			
			4 IKM pelayanan administrasi	Baik	Baik	100,00				

5	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	5.1 Pelayanan adminduk capil keliling	Masukan	: Jumlah dana	Rp	106.000.000	98.372.000	92,80	Disdukcapil		
			Keluaran	: Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan	keg	40	40	100,00			
			Hasil	1	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	92,66		109,01	
				2	Persentase kepemilikan akta kematian	%	20	79,72		398,60	
		3		IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00			
		5.2 Penyimpanan dokumen dan perubahan akta capil	Masukan	: Jumlah dana	Rp	80.000.000	64.387.000	80,48		Disdukcapil	
			Keluaran	: Jumlah berkas akta capil yang tersimpan	berkas	25.000	30.110	120,44			
			Hasil	1	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	92,66			109,01
				2	Persentase kepemilikan akta kematian	%	20	79,72			398,60
	3			IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00			
	5.3 Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	Masukan		: Jumlah dana	Rp	40.000.000	34.724.000	86,81	Disdukcapil		
		Keluaran	: Jumlah pelayanan kependudukan yang dilaksanakan	buku	150	42	28,00				
Hasil		1	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	92,66	109,01				
		2	Persentase kepemilikan akta kematian	%	20	79,72	398,60				
		3	IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00				
		6	Program pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	6.1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Masukan	: Jumlah dana	Rp	90.000.000		83.796.000	93,11
Keluaran	: Jumlah titik yang terbangun dan mengoperasikan jaringan SIAK				titik	1	1	100,00			
Hasil	1			Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12	100,13			
	2			Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100,00			
	3			Persentase kepemilikan KIA	%	10	13,63	136,30			
	4			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	92,66	109,01			
	5			Persentase kepemilikan akta kematian	%	20	79,72	398,60			
6	IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00						

7	Program pemanfaatan data dan pengembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	6.2 Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangunan, Updating, Dan Peeliharaan)	Masukan	: Jumlah dana	Rp	197.000.000	176.947.085,00	89,82	Disdukcapil	
			Keluaran	: Jumlah implementasi titik jaringan SIAK	titik	20	20	100,00		
			Hasil	1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12		100,13
				2	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100		100,00
				3	Persentase kepemilikan KIA	%	10	13,63		136,30
				4	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	92,66		109,01
				5	Persentase kepemilikan akta kematian	%	20	79,72		398,60
		6		IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00		
		6.3 Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan	Masukan	: Jumlah dana	Rp	26.000.000	22.016.000	84,68	Disdukcapil	
			Keluaran	: Jumlah laporan yang tersusun	buku laporan	110	110	100,00		
			Hasil	1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	92	92,12		100,13
				2	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100		100,00
				3	Persentase kepemilikan KIA	%	10	13,63		136,30
				4	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	85	92,66		109,01
				5	Persentase kepemilikan akta kematian	%	20	79,72		398,60
		6		IKM pelayanan administrasi kependudukan		Baik	Baik	100,00		
		7.1 Pengembangan database kependudukan dalam menunjang laporan kependudukan	Masukan	: Jumlah dana	Rp	100.400.000	88.702.300,00	88,35	Disdukcapil	
			Keluaran	: Jumlah kecamatan dan desa/kel yang melakukan entri database kependudukan	kec dan desa/kel	348	348	100,00		
			Hasil	1	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100		100,00
		7.2 Promosi dan pameran kependudukan	Masukan	: Jumlah dana	Rp	30.000.000	25.490.000	84,97	Disdukcapil	
			Keluaran	: Jumlah promosi dan pameran	kali	1	1	100,00		
Hasil	1	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100	100,00				
	7.3 Fasilitasi penerapan ISO bidang pelayanan	Masukan	: Jumlah dana	Rp	78.000.000	70.410.000	90,27	Disdukcapil		
Keluaran		: Jumlah sertifikat ISO	sertifikat	1	1	100,00				
Hasil	1	Persentase ketersediaan informasi data kependudukan	%	100	100	100,00				